

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

Bab ini akan memaparkan terkait tinjauan teori dalam mendukung penelitian ini agar disajikan secara sistematis dan terukur. Pembahasan bab 2 ini menjelaskan yaitu *Pertama* Kajian pustaka, ini menjelaskan terkait beberapa temuan penelitian terdahulu. *Kedua* kerangka teori, ini menjelaskan beberapa pendapat ahli terkait teori-teori dalam penelitian. *Ketiga* kerangka berfikir, ini menjelaskan road map penelitian ini agar lebih jelas terarah. *Keempat* Hipotesis, menjelaskan beberapa jawaban sementara dalam penelitian. *Kelima* Definisi Konseptual, ini menjelaskan secara abstrak melalui konsep peneliti yang diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dalam penelitian ini. *Keenam* Definisi Operasional, menjelaskan beberapa variabel dan parameter penelitian ini

#### 2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini akan mengklasifikasi 3 (tiga) jenis penelitian terdahulu yaitu, *Pertama* Jual beli suara akibat sistem proposional terbuka, *Kedua* sistem proposionalitas terbuka berdampak peningkatan partisipasi, *Ketiga* Sistem Proposional terbuka berdampak memudarnya partai politik

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Sanz (2015:9) dengan judul “*The Effect of Electoral Systems on Voter Turnout: Evidence from a Natural Experiment*” bahwa sistem penggunaan proposional terbuka di negara Spanyol membuktikan sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Spanyol. bahwa sistem daftar terbuka di mana partai-partai berjalan dalam daftar kandidat tetapi pemilih dapat mengekspresikan preferensi mereka untuk kandidat individu kondusif untuk lebih banyak pemilih. Dalam artian sistem proposional terbuka mengakibatkan partai politik untuk mengekspresikan visi dan misinya kepada masyarakat dibandingkan proposional tertutup. Dampak proposional tertutup ini sangat significant dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Spanyol

Vicente (2015:32) dan Mietzner (2015:11) menjelaskan dampak dari diberlakukannya proposional terbuka di Afrika barat mengakibatkan sistem pemilu menjadi jual beli suara. Praktik jual beli suara sangat masif terjadi. Dalam temuan di Afrika barat partisipasi pemilih meningkat drastis namun peningkatan partisipasi pemilih tersebut salah satunya faktor terjadinya praktik jual-beli suara. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa proposional terbuka mengakibatkan incumbent sangat sulit dikalahkan di Afrika barat, faktor nya ialah mereka memiliki anggaran negara yang dapat digunakan

sebagai proses kampanye Muhtadi (2018:67) dalam disertasinya yang berjudul *Buying Votes In Indonesia Partisans Personal Networks and Winning Margins*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa winning margins atau selisih kemenangan merupakan salah satu masalah dalam proposional terbuka dan mengakibatkan efek jual beli suara. Proposional terbuka di Indonesia mengakibatkan persaingan caleg di internal partai politik terjadi dan angka kemenangan sangat tipis. Disini terjadi dilema politik yang akhirnya caleg tersebut melakukan praktik politik uang atau jual beli suara.

Dalam pandangan (Minan, 2018) dalam temuannya pada Pileg 2014 sistem proposional terbuka berdampak penerapan sistem pemilu proporsional terbuka maupun analisa kerangka hukum menemukan beberapa kesimpulan penting. LADK untuk Pileg 2014 menunjukkan dominannya kontribusi caleg terhadap penerimaan dana kampanye. Selain itu, juga terlihat dominannya jenis belanja kampanye yang dilakukan oleh caleg DPR dan DPRD. Sedangkan kontribusi partai politik kurang signifikan, terutama di kalangan partai menengah dan kecil. Sementara di kalangan partai menengah dan besar cenderung masih mengalokasikan dukungan untuk menopang pembiayaan kampanye. Fenomena diikuti dengan menurunnya kontribusi pihak ketiga, baik individual donor maupun badan usaha dan kelompok dalam pembiayaan kampanye. Hanya

partai besar dan menengah yang mampu menggalang dukungan dana kampanye dari pihak ketiga. Sedangkan partai kecil tampak mengalami kesulitan. penerapan sistem proporsional daftar terbuka belum diikuti dengan penyesuaian kerangka hukum sistem pembiayaan kampanye yang masih menerapkan model yang sama dengan saat sistem pemilu proporsional daftar tertutup. Dengan demikian, antara sistem pemilu dan sistem pembiayaan kampanye tidak sinkron. Hal ini berdampak pada potensi dirugikannya kepentingan para yang bukan elit atau pengurus partai politik. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk memperbaiki kerangka hukum sistem pembiayaan kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD agar lebih sesuai dengan sistem pemilu yang diterapkan serta lebih mampu menjamin keadilan antar caleg.

Penelitian yang dilakukan oleh Minan hampir mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Mellaz (2018) menjelaskan penerapan pileg daftar terbuka pada dua kali pileg di Indonesia ditandai dengan menguatnya fenomena personal vote dan candidate-center politics. Kombinasi dua fenomena tersebut menggeser orientasi kampanye menjadi lebih personal dan mendorong peningkatan pembiayaan kampanye. Berdasarkan data LPPDK, pembiayaan kampanye mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat. Dari angka Rp 834 milyar pada Pileg 2009, menjadi menjadi Rp 3,1 trilyun pada Pileg

2014. Data ini baru sebatas menyediakan potret pembiayaan kampanye pileg DPR RI, dan tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada sisi penerimaan. Pileg 2014 memberikan sinyal kuat munculnya candidate-centered politics dalam kompetisi. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi sumbangan sebesar 82,65% atau senilai Rp 1,8 yang tercatat dalam LPSDK. Tendensi personalisasi juga diperlihatkan dari sumbangan perseorangan yang tercatat sebesar Rp 182,7 milyar atau 8,34%. Partai politik sebagai entitas peserta pemilu hanya berkontribusi sebesar Rp 166 milyar atau setara dengan 7,60% dari total penerimaan sumbangan dana kampanye. Fakta ini memberikan indikasi bahwa partai politik hanya berfungsi tidak lebih sebagai instrumen nominasi, atau kendaraan bagi caleg untuk mencalonkan. Pada sisi pengeluaran, gejala candidate-centered politics di Pileg 2014 juga makin mengental. Data LADK memperlihatkan orientasi pengeluaran kampanye pada sisi caleg. Dari akumulasi enam komponen pengeluaran, seperti: Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga, Kegiatan Lain, dan Pengeluaran Caleg. Jika ditotal, candidate-center politics sisi pengeluaran memiliki porsi 80,93% dari total LADK. Sedangkan pengeluaran kampanye yang menjadi ciri party-centered politics, seperti: Rapat Umum, Iklan Kampanye, dan Pengeluaran Modal hanya mencatatkan porsi 19,07%.

Menurut Halim (2014) hasil penelitian ini ialah dalah pertimbangan untuk mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan mereka. Upaya perekrutan massa dilakukan dengan cara pragmatis, membentuk tim jaringan terluas bertugas memenangkan calon, dan melengkapi mereka dengan sejumlah uang. Network Success Team (Timses) dihadapkan tidak hanya dengan kandidat Times dari partai politik yang berbeda, tetapi juga dari partai politik yang sama. “Nominal Competition” sangat panas, ketat, dan tidak bisa di sangkal. Namun, pertimbangan kurang empiris menemukan pijakan di tengah-tengah masyarakat, mengingat tingkat kritik dan pendidikan politik yang memadai. Ditambah dampak elit politik dan para kelompok kandidat lebih mudah beradaptasi dengan keadaan yang ada di masyarakat. Akibatnya, praktik politik uang lebih mungkin disebabkan oleh pertimbangan subjektif, yang jauh dari jenis pengaruh eksternal, seperti sistem proporsional

Dalam pandangan Faller&Glynn (2013:11) menjelaskan mengusulkan bahwa sistem pemilihan pluralitas harus mengarah pada korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem proporsional perwakilan (PR) karena yang pertama menciptakan hubungan langsung antara pemilih dan politisi yang pemilih dapat bertanggung jawab atas korupsi. Akan tetapi, pertanyaan empiris masih belum terselesaikan,

dalam hal ketidakberpihakan pada lembaga pemilihan lembaga dan kesulitan dalam mengukur korupsi. Dengan menggunakan metode nonparametrik dan data baru untuk mengurangi sensitivitas terhadap masalah ini, kami menemukan bukti untuk hipotesis awal. Sebagai gantinya, kami menemukan beberapa bukti di arah yang berlawanan, bahwa PR mengarah pada lebih sedikit korupsi. Dan penelitian ini menjelaskan sangat memungkinkan sistem proposional

Penelitian yang dilakukan Simamarta (2017:31) menjelaskan sistem proposional terbuka Pertama, jika dalam pemilu nanti yang mencoblos nama tiap caleg suaranya lebih besar daripada yang mencoblos tanda gambar parpol, maka suara yang mencoblos tanda gambar parpol dikonversi ke suara caleg yang memiliki perolehan suara terbanyak pada dapil terkait dan penentuan kursinya berdasarkan suara terbanyak caleg. Kedua, sebaliknya jika yang mencoblos nama tiap caleg suaranya lebih kecil daripada yang mencoblos tanda gambar parpol, maka suara yang mencoblos nama tiap caleg dikonversi ke suara parpol dan penentuan caleg terpilihnya berdasarkan nomor urut. Ketiga, jika yang mencoblos nama tiap caleg suaranya lebih besar daripada yang mencoblos tanda gambar parpol, maka suara yang mencoblos tanda gambar parpol dikonversi ke suara caleg dan penentuan kursinya berdasarkan suara terbanyak. Dampak terbesar dari sistem proposional

terbuka ini caleg menjadi sentral bukan partai politik yang pada akhirnya proses pengkaderan partai politik tidak berjalan dengan baik.

Menurut Efriza (2019:9) sistem proposional dalam penelitiannya mengakibatkan beban caleg untuk mendanai dirinya sendiri berdampak pada egoisme kandidat dan cenderung tidak patuh terhadap partai politik. ini berakibat hilangnya idelologi partai politik akibat pragmatisme kandidat beserta partai untuk merebut suara dalam pemilihan. Ini sama dengan penelitian Aminuddin (2015:31) Hampir semua partai politik di Indonesia saat ini, merupakan partai baru atau setidaknya merupakan “peranakan” dari partai lama yang mengalami perubahan pelebagaan dan karakteristik seiring dengan dinamika yang berkembang pasca reformasi. Sedangkan partai-partai yang sebelumnya telah terbentuk sejak Orde Baru (Golkar dan PPP), dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan baik di internal dan eksternal partai. Bagi partai-partai baru yang kemudian gagal memperoleh kursi, atau memperoleh sedikit kursi kemudian tersingkir sejak tahun 2009 karena aturan parliamentary threshold, atau bertahan hingga pasca pemilu 2014, partai-partai ini cenderung memanfaatkan potensi pragmatis yang berkembang. Partai-partai inilah yang dalam artikel ini dikategorisasikan sebagai match-all party. Ciri khas yang tampak oleh partai-partai match-all, dan tak

tertangkap dalam klasifikasi spesies partai elektoralis Gunther dan Diamond, adalah pada ketiadaan atau minimnya modal sosial sebelum partai ini lahir dan berkembang. Figur menjadi instrumen utama dalam pasar politik, di samping jargon platform dan program yang kerap tak menarik perhatian pemilih. Lemahnya figur dan konsistensi program, menjadikan partai kategori match-all harus memanfaatkan segala kemungkinan dan kondisi yang memberikan mereka keuntungan baik dalam dimensi citra maupun materiil. Gerak politik match-all party mengabaikan pembatasan ideologi, platform dan strategi untuk mengimplementasikan program-programnya. penelitian yang dilakukan oleh

Pratiwi (2018:21) menjelaskan sistem proposional akan meminimalkan loyalitas calon terhadap parpol. Hal ini terlihat dari banyaknya politikus yang pindah partai karena partai asalnya tidak mengusung dalam pemilu legislatif. Tentu saja ini akan melahirkan calon legislatif karbitan dan mengakibatkan krisis kewibawaan parpol. Sistem pemilu ini juga menstimulasi kampanye berpusat pada calon. Reputasi personal calon lebih penting daripada reputasi partai. Tidak heran apabila sistem pemilu seperti ini seringkali disebut sebagai Sistem Pemilu Proporsional yang berpusat pada kandidat. Hal ini tidak lain karena setiap calon melakukan kampanye relatif bebas dari intervensi partai politik yang

mencalonkan. Calon tidak hanya menentukan strategi dan taktik kampanye, tetapi juga menentukan tema kampanye. Calon tidak hanya mencari dana kampanye sendiri, tetapi juga menentukan sendiri penggunaan dananya. Perolehan suara terbanyak dalam pemilu belum tentu identik dengan kualitas politisi yang duduk di parlemen, karena sistem pemilu ini membuka peluang bagi calon-calon populer untuk dipilih tanpa kompetensi, dibandingkan dengan calon-calon berkompeten tapi tidak populer. Dari sisi sirkulasi elite sistem suara terbanyak memang sangat baik, namun dari sisi kualitas belum menjamin kualitas yang duduk di lembaga parlemen.

Menurut Eggers & Dominik, (2014:44) menjelaskan bahwa sistem PR terbuka mengakibatkan korupsi besar terjadi dibandingkan proposional tertutup. Secara teknis pemilihan proposional terbuka lebih rumit. Namun sistem proposional terbuka dipercaya dapat meningkatkan partisipasi pemilih dibandingkan proposional tertutup

Tabel 2.1. Ringkasan Studi Pustaka Terdahulu

No	Pengelompokan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p><i>Jual beli suara akibat sistem proposional terbuka</i></p>	<p>(Muhtadi, 2018), (Vicente, 2015), (Dian Agung Wicaksono, 2014), (Aspinal, 2014), (Mellaz, 2018), (Minan, 2018), (Mietzner, 2015) (Halim, 2014), (Preiffer, 2004).</p> <p>Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem proposional terbuka mengakibatkan sistem pertarungan semakin kompetitif dan terjadi dilema politik yang berakibat pada terjadinya efek jual beli suara. Sistem proposional terbuka mengakibatkan caleg menjadi sentral dibandingkan partai politik. dari penelitian</p>

		tersebut sama-sama beragumentasi penyebab terjadinya jual beli suara akibat dari berlakukanya sistem proposional terbuka.
2	<i>Sistem Proposional Terbuka berdampak peningkatan partisipasi</i>	(Stockemer, D., & Calca, 2014) ,(Carrecas, 2017),( Scoot, 2014), (Mann, 2004) (Rahmdani, 2014), (Brockington, 2004), (Marc Hooghe, 2013),(David J Andersen, 2011). Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem proposional terbuka berdampak meningkatnya partisipasi pemilih dibandingkan sistem proposional tertutup. Alasan utama ini peneliti sama-sama menjelaskan bahwa dengan list open propotional pemilih dapat

		menentukan prefensinya sendiri dan dapat mempengaruhi kandidat langsung dibandingkan sistem proposional tertutup. Daya tarik pemilih untuk datang ke TPS dalam sistem proposional terbuka ialah pemilih dapat mengetahui langsung latar belakang kandidat.
3	<i>Sistem Proposional terbuka Berdampak mudarnya Ideologi partai politik</i>	(Efriza, 2019), (Wibowo, 2013), (M. FAISHAL AMINUDDIN, 2015). (Pratiwi, 2018) Penelitian ini memiliki persamaan pembahasan bahwa sistem proposional terbuka dimana peran kandidat lebih besar dibandingkan partai politik, serta beban pendanaan kampanye sepenuhnya ditanggung

		<p>oleh kandidat mengakibatkan partai politik berfikir pragmatis dalam merekrut kandidat calon legislatif. Proses pengkaderan murni di partai Indonesia hanya sebatas formalitas.</p> <p>Kandidat yang memiliki modal yang besar lebih diperhitungkan dibandingka, kandidat yang berkualitas. Dengan fenomena seperti itu partai politik tidak memikirkan lagi terkait ideologisasi parpol yang dipikirkan ialah materi untuk kemenangan merebut kursi</p>
--	--	--

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat mengenai penelitian terdahulu sebagai gambaran dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu berbicara terkait dampak sistem proposional terbuka, dan ini sangat berbeda dengan penelitian

yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini membahas tentang persepsi penyelenggara pemilu terhadap sistem proposional terbuka yang menghasilkan penyelenggaraan yang rumit serta berdampak pada pelanggaran pemilu yang cukup tinggi. Selanjutnya di sisi aktor politik bagaimana persepsi aktor politik pada sistem proposional terbuka apakah aktor politik merasa menyetujui sistem ini atau justru dirugikan dalam aspek pertarungan politik

## 2.2. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini menjelaskan 4 (empat) teori yaitu, Pertama Teori persepsi, Kedua Partai politik, Ketiga Lembaga penyelenggara pemilu, Keempat Sistem proposional. Berikut dibawah ini penjelasan lebih mendalam terkait masing-masing penjelasan teori dalam penelitian ini.

### **a. Teori Persepsi**

Dalam pandangan Rivai (2009:54) persepsi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang atau individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan atau pesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi karena perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka

mengenai apa itu realitas dan bukan mengenai realitas itu sendiri.

Individu itu mempredisikan suatu benda yang sama berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor yang ada pada pelaku persepsi (*perceiver*) yang termasuk faktor pertama adalah sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau minat pengalaman dan pengharapan individu. Kedua faktor yang ada pada objek atau target yang dipersepsikan yang meliputi hal-hal baru, gerakan, sistem, ukuran latar belakang dan kedekatan. Ketiga, faktor konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan yang meliputi waktu, keadaan / tempat kerja, dan keadaan sosial (Rivai, 2009:9)

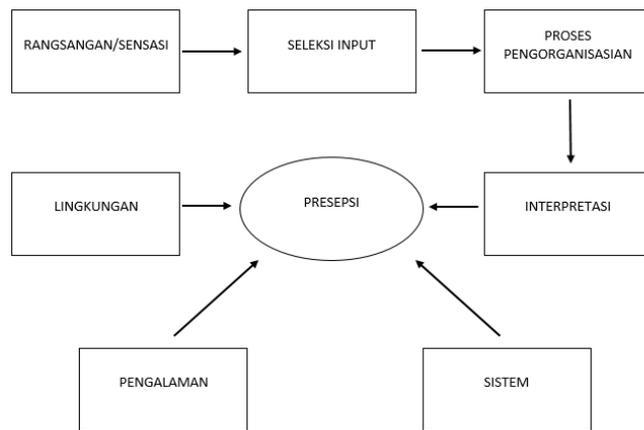
Persepsi adalah proses seseorang atau individu dan menginterpretasikan stimulasi ke dalam suatu gambaran yang berarti dan koheren dengan dunia sekitarnya. Persepsi merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam ilmu psikologi dan kognitif persepsi adalah proses untuk memperoleh, menginterpretasi, menyeleksi dan mengorganisasi informasi. Metode studi persepsi dapat dengan pendekatan biologi atau psikologi untuk menggambarkan pemikiran dari mental psikologi (Neyman, 2017)

Dari beberapa pendapat diatas dapat di analisis sesungguhnya persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan nya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk

memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Proses Pembentukan Persepsi menurut (Damayanti, 2017:10) digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2.1. Skema Pembentukan Persepsi



Sumber: Damayanti (2017:10)

Proses pembentukan persepsi menurut Damayanti (2017:11) dimulai dengan penerimaan rangsangan dari panca indera yang dimiliki, setelah itu diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsang lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang ada diseleksi. Untuk menghemat perhatian yang digunakan rangsangan-rangsangan yang telah diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi rangsangan diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan rangsangan yang telah diterima.

Setelah data diterima dan diatur, proses selanjutnya individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara. Dikatakan telah terjadi persepsi setelah data atau rangsang tersebut berhasil ditafsirkan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Aziz (2018:43) menyebabkan interpretasi berbeda, walaupun apa yang dilihatnya sama. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

1. Individu yang bersangkutan (pemersepsi)

Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya.

2. Sasaran dari persepsi

Sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang dilihat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat secara teori melainkan dalam kaitannya dengan orang lain yang terlibat.

3. Situasi

Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

## **b. Partai Politik dan Elite Partai**

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak.

Pengertian partai politik menurut Neuman (2007:21) adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda

Pandangan Friedrich (2014:11) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang ideal maupun materil

Menurut Schumpeter (2003:100) dalam bukunya partai politik ialah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian oragnisasinya.

R.H Soltau (2007:17) partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai poliik merupakan sarana bagi warga negara utnuk berpartisipasi dalam peroses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu gaolongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda

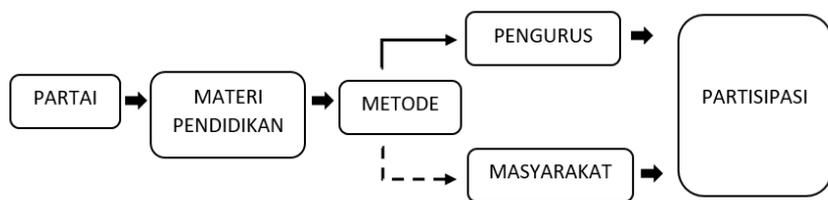
Cangara (2009:71) juga menarik sebuah pemahaman bahwa partai politik memiliki tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Partai Sebagai Koalisi, Yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi.
- b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok
- c. Partai sebagai pembuat Kebijakan partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara kongret

para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Partai politik juga memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik menurut firmanzah (2011:111) melalui sosialisasi partai politik ini partai politik berusaha untuk menamamkan ideologi partai kepada masyarakat. Berikut gambar proses pendidikan yang diselenggarakan oleh partai politik menurut Firmanzah:

Gambar. 2.2. Pendidikan Politik oleh Partai Politik



Sumber: (Firmanzah, 2011)

Partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada pengurus dan kader partai serta masyarakat

#### 1) Materi pendidikan

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader dan pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berfikir futuristik.

## 2) Metode Pendidikan

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada praktinya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung, misalnya menggunakan perantara

## 3) Tujuan pendidikan

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai politik adalah meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak, kewajiban partai politik, serta untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai

Dalam pandangan Al-Hamdi, (2019:21) partai politik di Indonesia di klasifikasi menjadi 3 bagian yaitu, Partai Besar, Partai Menengah, Partai Kecil. Berikut penjelasan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Klasifikasi Partai Politik di Indonesia  
Berdasarkan Kekuatan Organisasi

<b>KATEGORI</b>	<b>DESKRIPSI</b>	<b>NAMA PARTAI</b>
Partai Besar (Major Party)	Partai-partai yang memperoleh suara diatas 10% pada Pemilu 2019. Partai-	PDIP, Gerindra, Golkar

	partai dikategori ini adalah nasionalis-sekuler	
Partai Menengah (Medium Party)	Partai politik yang memperoleh suara antara 4% dan 10% pada Pemilu 2019. Mayoritas partai islam ada di kategori ini	PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PPP
Partai Kecil (Small Party)	Partai-partai lama yang tidak mampu meraih ambang batas 4% suara secara nasional pada pemilu 2019	Hanura, PBB, PKPI
	Partai-partai yang baru ikut berkontestasi pada Pemilu 2019 dan belum pernah menjadi kontestan pada pemilu sebelumnya	Perindo, Berkarya, PSI, Garuda

Sumber: (Al-Hamdi, 2019)

Selanjutnya pemahaman terkait elit partai politik Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan

khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan (Bottomore, 2001:21)

Menurut Jurdi (2004:19) Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbale balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah produk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antarelite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diteljemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya

Dalam pandangan Dwipayana (2016:13) Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, elite mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan elite dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non governing elite), sedangkan dalam masyarakat juga terdapat lapisan yang lebih rendah (non elite).

Menurut Suhawi (2017:77) elite partai politik adalah sekelompok kumpulan didalam kepengurusan partai politik yang dapat mempengaruhi kebijakan di elite politik seperti Presiden, Gubernur, Walikota, Senator. Kelompok ini biasa disebut sebagai pejuang rumah organisasi.

Pandangan Budiarti ( 2018:31 ) elite partai politik ialah orang-orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur proses kepemimpinan di elite pemerintah atau negara. pengertian yang dimaksud ini bisa disebut sebagai pengurus partai. Yang memiliki fungsi mengatur jalannya kaderisasi proses kepemimpinan politik dalam suatu negara.

Menurut Putnam (dalam Varma, 1987:203 ) Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti:Gubernur,Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik. Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

### **c. Lembaga Penyelenggara Pemilu**

Sistem demokrasi moderen sangat mengoptimalkan pemilu tidak hanya dilakukan hanya ebatas ritual suksesi kepemimpinan semata. Lebih dari dalam pemahaman itu pemilu diharapkan benar-benar menjadi aktualisasi dan manifestasi

kedaulatan rakyat. Dalam rangka mencapai kedaulatan rakyat tersebut, penyelenggara pemilu harus didasarkan pada prinsip *free and fair election* (bebas dan adil).

Menurut Wall (2016:9) Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan, dan bertanggung jawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya – seperti referendum dan pemungutan suara ulang – jika instrumen-instrumen tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja yang bersifat legal.

Lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki peran untuk melakukan tugas-tugas yang dapat membantu terlaksananya pemilu dan instrumen pelaksanaan demokrasi langsung, seperti registrasi pemilih, menghapus batasan-batasan kepemiluan, menyediakan pendidikan dan informasi bagi pemilih, pengawasan media, dan mencarikan resolusi bagi konflik-konflik dan perbedaan pendapat terkait pelaksanaan pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara pemilu di sebuah negara demokrasi harus berdiri independen tidak ada sangkut pautnya oleh peserta pemilu.

Wall (2016:17) menjelaskan ada 3 model umum penyelenggara pemilu yaitu model Independen, model pemerintahan, model kombinasi. Berikut penjelasan :

#### 1. Model Penyelenggaraan Independen

Model ini penyelenggara pemilu independen yang dimaksud Lembaga penyelenggara pemilu terpisah dari

pemerintah. Tidak ada cabang dari eksekutif pemerintah dalam mengontrol Lembaga penyelenggara pemilu. Di dalam Model Independen, Lembaga penyelenggara pemilu tidak bertanggung jawab langsung kepada kementerian atau departemen pemerintah. Lembaga penyelenggara pemilu hanya bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, lembaga yudisial, atau kepala pemerintahan. Di dalam Model Independen, Lembaga penyelenggara pemilu lebih memiliki otonomi dan akuntabilitas finansial, serta akuntabilitas performa kerja. Anggotanya terdiri dari orang-orang yang berada di luar lembaga eksekutif selama menjabat di Lembaga penyelenggara pemilu. Kebanyakan negara yang baru mengalami transisi demokrasi lebih memilih untuk menggunakan Model Penyelenggaraan Independen. Contoh-contoh negara yang menggunakan Model Independen adalah Armenia, Australia, Bosnia & Herzegovina, Burkina Faso, Kanada, Kosta Rika, Estonia, Georgia, India, Indonesia

## 2. Model Penyelenggara Pemerintahan

Model ini penyelenggara pemilu lembaga penyelenggara pemilu dibentuk dan di kelola oleh lembaga eksekutif negara melalui sebuah kementerian seperti misalnya Kementarian dalam negeri. Di negara-negara yang menggunakan Model Pemerintahan untuk pemilu tingkat nasional, penyelenggaraannya dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin Kabinet. Dengan beberapa pengecualian, lembaga penyelenggara ini biasanya tidak memiliki ‘anggota’. Dana

penyelenggaraan biasanya menjadi tanggung jawab kementerian dan/atau pemerintah daerah. Saat orde baru lembaga penyelenggara pemilu dibawah kemendagri

### 3. Model Penyelenggaraan Kombinasi

Di dalam penyelenggaraan pemilu model kombinasi, biasanya ada dua komponen Lembaga Penyelenggara Pemilu dan struktur ganda: Lembaga penyelenggara pemilu independen yang bertugas untuk mengurus kebijakan dan pengawasan (sebagaimana Lembaga penyelenggara pemilu pada Model Independen) dan LPP yang bertugas melakukan implementasi proses pemilu yang berada di bawah departemen negara atau pemerintah daerah (sebagaimana Lembaga penyelenggara pemilu pada Model Pemerintahan). Di dalam Model Kombinasi, pemilu diorganisir oleh Lembaga penyelenggara pemilu yang berada di bawah lembaga pemerintahan, sedangkan fungsi pengawasan diserahkan kepada komponen Lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Penyelenggaraan Model Kombinasi ini kerap digunakan di Perancis, Jepang, Spanyol, dan banyak negara bekas jajahan Perancis, khususnya di wilayah Afrika Barat, misalnya Mali, Senegal, dan Togo.

#### **d. Aktor Politik**

Aktor politik berarti pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Berbicara mengenai politik tidak terlepas dari para Aktor. Aktor didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan atau memiliki posisi penting. Aktor politik adalah pribadi unggul yang mempunyai kecerdasan, dan kedewasaan

yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri. Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Disini peran aktor adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan kepentingan publik (Suhawi, 2017:77)

Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang, terbaik. Mereka yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat. Aktor mencakup individu pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Aktor mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Dasar fundamental dari pendekatan aktor adalah masyarakat dianggap sebagai suatu piramida dimana yang duduk dipuncaknya disebut aktor . Kelompok aktor adalah suatu fenomena yang abadi akan selalu lahir dan tidak mungkin tidak ada dalam suatu masyarakat. Aktor merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik.

Menurut Dwipayana (2016:13) dalam mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori aktor politik, maka terdapat tiga metode yakni;

1. Metode Posisi, aktor politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. aktor ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, parpol, kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.
2. Metode Reputasi, aktor politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Metode Pengaruh/Keputusan, aktor politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik.

Aktor politik harus mampu menguasai Ilmu retorika, dialektika, dan public speaking karena hal ini mengenai penyampaian pesan-pesan politik kepada masyarakat agar seorang aktor politik mampu memberikan pengaruh atau dapat

mempengaruhi masyarakat lewat kata-kata yang diucapkannya lewat pidato atau kampanye politiknya.

Aktor politik bisa dikatakan seseorang yang menjadi pusat perhatian dibidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Seorang tokoh bernama Letser G. Seligman (dalam Dwipayana ,2016:13) mengemukakan bahwa proses pengangkatan aktor-aktor politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu:

1. Masalah kekuasaan.
2. Legitimasi elite politik.
3. Representativitas elite politik.
4. Korelasi antara pengangkatan aktor-aktor politik dengan perubahan politik.

Aktor politik tak akan lepas dari sebuah partai politik, karena partai politiklah yang kemudian melahirkan kader-kader atau calon aktor politik yang kemudian akan berkecimpung dalam dunia politik. Peranan aktor politik sangat penting guna menghimpun kekuatan politik suatu partai, karena biasanya sosok seorang tokoh politik yang sudah tergambar bagus citranya di masyarakat cenderung akan mudah dimobilisasi oleh seorang aktor politik. Begitu halnya ketika seorang aktor politik suatu partai politik terjerat suatu kasus yang kemudian akan memperburuk citranya di mata masyarakat, maka secara tidak langsung hal itu juga akan berdampak kepada partai politik. Artinya seorang aktor politik merupakan kunci keberhasilan atau malah menjadi awal

penyebab keterpurukan sebuah partai politik, karena aktor politik mempunyai posisi yang fital dalam suatu partai politik.

**e. Sistem *Propotional Representation (PR)* dalam pemilu**

Sistem proposional merupakan kebalikan dari sistem distrik. Dalam sistem ini jumlah wakil yang duduk di pemerintahan tidak bergantung kepada jumlah penduduk. Selain itu, jumlah daerah pemilihan tidak terlalu banyak seperti pada sistem distrik karena luasnya daerah pemilihannya ( setara provinsi di Indonesia). Caleg yang akan maju menurut sistem proposional ini pun tidak harus berasal dari daerah pemilihan asal, tetapi juga dapat berasal dari daerah lain.

Dalam pandangan Labolo, (2015:61) tujuan awal sistem PR adalah untuk menghasilkan lembaga perwakilan di mana proposi kursi-kursi yang dimenangkan oleh tiap-tiap partai kurang lebih merefleksikan proporsi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai. Di dalam sistem ini partai politik diberi kewenangan untuk menerapkan daftar urutan nama-nama caleg mulai tingkat nasional sampai daerah

Dalam pandangan Andrew (2016:101) Penjelasan rasional yang mendasari sistem PR adalah proses mengkonversi proporsi suara partai menjadi proporsi kursi di lembaga legislatif. Ada dua tipe utama sistem PR—Daftar PR dan Single Transferable Vote (STV). PR mensyaratkan penggunaan daerah pemilihan dengan lebih dari satu wakil: tidak mungkin membagi satu kursi terpilih untuk satu kesempatan secara proporsional. Di beberapa negara, seperti Israel dan Belanda, seluruh negara

merupakan satu daerah pemilihan berwakil majemuk. Di negara-negara lain, misalnya Argentina atau Portugal, daerah-daerah pemilihan didasarkan pada provinsi, sedangkan Indonesia menetapkan ukuran-ukuran yang diperbolehkan bagi daerah pemilihan dan tugas penetapan itu diserahkan kepada lembaga penyelenggara pemilunya.

Menurut Sukriono (2009:31) sistem Proporsional merupakan sistem yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Sistem proporsional dapat dimaknai bahwa satu dapil memilih beberapa wakil. Sistem ini juga dinamakan perwakilan berimbang ataupun multi member constituency. ada dua jenis sistem di dalam sistem proporsional, yaitu:

- a. Sistem Proporsional Tertutup (*List proportional representation*) disini partai-partai peserta pemilu menunjukkan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.
- b. Sistem Proporsional Terbuka (*the single transferable vote*): para pemilih diberi otoritas untuk menentukan pilihannya. pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota yang sudah diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku

#### Kelebihan Sistem Proporsional

- Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.

- Setiap suara dihitung & tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat majemuk (pluralis).

#### Kelemahan Sistem Proporsional

- Sistem proporsional tidak begitu mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi partai.
- Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
- Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas

Perbedaan utama antara sistem proporsional & distrik adalah bahwa cara penghitungan suara dapat memunculkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

Di Indonesia sistem pemilu legislatif 2014 yang digunakan sistem proposional, the single transferable vote (terbuka). Pada sistem proposional the single transferable vote para pemilih dapat memilih calon kandidat yang terdaftar dalam daftar pemilihan umum sesuai dengan pilihannya. Perbedaan

pemilu 2014 dengan 2019 ialah pemilu 2019 dilakukan secara serentak antara legislatif dan eksekutif

Berikut penjelasan terkait sistem proposional terbuka dan sistem proposional tertutup sebagai berikut:

### *1. Open List Propotional/Proposional Terbuka*

Dalam sistem daftar respresentasi proposional setiap partai atau kelompok mengajukan daftar kandidat untuk daerah pemilihan berwakil majemuk, para pemilih memilih partai, dan partai-partai memperoleh kursi yang sesuai proposisi porsi mereka dalam perolehan suara. Selama beberapa sistem terbuka atau bebas pemilih bisa mempengaruhi urutan kandidat dengan menandai prefensi individual (Rehfeld, 2011:71)

Dalam bentuknya yang paling sederhana, daftar PR melibatkan tiap-tiap partai yang menyodorkan sebuah daftar kandidat kepada pemilih di tiap-tiap daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih memberikan suara untuk sebuah partai, dan partai-partai memperoleh kursi sesuai proporsi keseluruhan porsi mereka dalam perolehan suara di daerah pemilihan. Para kandidat yang menang diambil dari daftar sesuai uruan mereka dalam daftar. Pilihan daftar PR tidak dengan sendirinya menguraikan secara menyeluruh sistem pemilu ini: banyak detail yang harus ditetapkan. Sistem yang digunakan untuk Sistem-sistem Pemilu dan Konsekuensinya menghitung alokasi kursi setelah suara dihitung bisa rata-rata tertinggi (Highest Average) atau Metode Largest Remainder (penghitungan dengan sisa suara terbesar). Rumus yang dipilih memiliki efek kecil tetapi kadang-

kadang sangat penting terhadap hasil pemilihan dalam sistem PR. Di Kamboja pada tahun 1998, sebuah perubahan dalam rumusan beberapa pekan sebelum hari pemungutan suara ternyata berefek memberi partai terbesar 64 kursi, bukan 59 kursi, di Majelis Nasional yang memiliki 121 kursi. Perubahan itu tidak dipublikasikan dengan baik, dan pihak oposisi sulit menerima hasil tersebut. Contoh ini dengan jelas memperlihatkan pentingnya detail-detail yang tampaknya remeh bagi para perancang sistem pemilu.

Menurut Andrew (2016:82) kebanyakan sistem daftar PR di Eropa Barat menggunakan daftar terbuka, di mana para pemilih bisa menunjukkan tidak hanya partai unggulan mereka tetapi juga kandidat unggulan mereka dalam partai tersebut. Dalam sebagian kasus sistem tersebut suara untuk kandidat maupun partai bersifat opsional dan, karena kebanyakan pemilih hanya memilih partai dan bukan kandidat, opsi pilihan kandidat surat suara sering kali terbatas efeknya. Kendati demikian, di Swedia lebih dari 25 persen pemilih secara teratur memilih seorang kandidat sekaligus partai, dan sejumlah individu yang terpilih pasti tidak akan terpilih jika daftarnya tertutup.

Menurut Halim (2014:68) Proporsional Representasi System (Sistem Proporsional Terbuka) adalah pertimbangan untuk mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan mereka. Upaya perekrutan massa dilakukan dengan cara pragmatis, membentuk tim jaringan terluas bertugas memenangkan calon, dan melengkapi mereka dengan sejumlah uang. Network Success Team (Timses)

dihadapkan tidak hanya dengan kandidat Times dari partai politik yang berbeda, tetapi juga dari partai politik yang sama. “Nominal Competition” sangat panas, ketat, dan tidak bisa di sangkal. Namun, pertimbangan kurang empiris menemukan pijakan di tengah-tengah masyarakat, mengingat tingkat kritik dan pendidikan politik yang memadai. Ditambah dampak elit politik dan para kelompok kandidat lebih mudah beradaptasi dengan keadaan yang ada di masyarakat. Akibatnya, praktik politik uang lebih mungkin disebabkan oleh pertimbangan subjektif, yang jauh dari jenis pengaruh eksternal, seperti sistem proporsional (terbuka atau tertutup)

Negara-negara yang menggunakan sistem proposional terbuka terbanyak di eropa barat seperti (Austria, Belanda, Belgia). Ditambah Indonesia, Brazil dan Filandia yang menggunakan sistem daftar proposional terbuka. Menurut Andrew (2016:102) sistem proposional terbuka memiliki keuntungan terbangunnya kedekatan antar pemilih. Ada keintiman antara pemilih dengan wakil rakyat, Bagi caleg perempuan sistem proporsional terbuka memberikan pembelajaran mengenai bagaimana cara berkompetisi dalam pemilu, Partai politik dituntut untuk melakukan rekrutmen caleg secara demokratis sehingga meskipun sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka bukan caleg yang hanya memiliki popularitas yang tinggi dan memiliki modal besar yang dipilih menjadi caleg tetapi yang memang memiliki dukungan dari grassroot,

Sistem proposional di Indonesia dianggap memiliki banyak masalah, menurut Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menilai, penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 diwarnai kekisruhan, akibat penerapan sistem proporsional terbuka. Penyelenggaraan Pemilu 2014 pun dinilai lebih buruk dibanding Pemilu 2009. Praktek kotor politik merajalela di tengah-tengah masyarakat, penyelenggara pemilu, dan Caleg. Sebab sistem proporsional terbuka mendorong, mau tidak mau, money politics (politik uang) dan kecurangankecurangan dalam bentuk lainnya.

Masalah ini juga dialami oleh Negara Brazil, sistem proposional terbuka berdampak pada peningkatan partisipasi pemilih yang di dorong atas terjadinya politik uang di masyarakat. Artinya peningkatan partisipasi pemilih salah satu penyebabnya terjadinya politik uang. Sistem proposional terbuka mengakibatkan modal politik cukup besar (Posner, 2005)

Sistem pemilihan PR-Open memungkinkan partai politik untuk menyerahkan daftar kandidat untuk dipertimbangkan, tetapi juga memungkinkan pemilih untuk menentukan peringkat para kandidat dalam daftar partai melalui beberapa metode pemilihan preferensial. Ini bertentangan dengan sistem daftar tertutup yang saat ini digunakan di Ukraina yang memungkinkan partai politik untuk menentukan urutan kandidatnya dan memberikan pemilih tidak ada pengaruh pada posisi kandidat yang ditempatkan pada daftar entitas. Tidak ada dua sistem pemilihan PR-Open yang sama karena negara-negara berbeda dalam struktur pemerintahan, metode pemilihan, alokasi kursi,

dan ambang batas untuk partai dan kandidat di antara perincian lainnya. Namun, sementara implementasi yang berbeda dari sistem PR-Open bervariasi dalam detail teknis, kekuatan dan kelemahan umum adalah sama. Kekuatan dari sistem daftar terbuka: Jelas sistem daftar terbuka memberdayakan pemilih dengan memungkinkan mereka untuk memilih calon individu dari partai pilihan mereka dengan memilih langsung untuk mereka daripada untuk daftar calon partai secara keseluruhan. Ini dapat mengurangi kekuatan pemimpin partai untuk memaksakan kandidat yang mereka pilih sebelumnya pada pemilih. Efek yang diinginkan adalah bahwa para kandidat sekarang lebih bertanggung jawab kepada pemilih dan lebih sedikit terhadap pemimpin partai. Kelemahan sistem daftar terbuka: Sistem daftar terbuka lebih sulit untuk dikelola karena lebih sulit untuk menghitung suara dan menghasilkan hasil. Juga, tergantung pada bagaimana suatu sistem mempertimbangkan ambang batas dan banyak konstituen ketika mengalokasikan kursi individu, sistem daftar terbuka dapat menghasilkan hasil kontra-intuitif yang sulit dipahami oleh pemilih (Mengapa seorang kandidat dengan suara lebih sedikit daripada lawan mendapatkan kursi?) . Akhirnya, menegakkan kuota gender dan etnis dapat terbukti sulit dalam sistem daftar terbuka (IFES, 2009)

## 2. *Close List Propotional*/ sistem proposional tertutup

Sistem proposional tertutup kandidat yang memenangkan kursi ditentukan dalam urutan nomor kandidat dalam list (daftar) yang disediakan. Makin kecil angka calon dalam daftar makin besar peluangnya untuk terpilih. Mayoritas sistem daftar PR di

dunia bersifat tertutup, artinya urutan kandidat yang dipilih dalam daftar ditetapkan oleh partai yang bersangkutan, dan pemilih tidak bisa mengungkapkan preferensi bagi kandidat tertentu. Sistem PR yang digunakan di Afrika Selatan adalah contoh bagus daftar tertutup. Surat suara memuat berbagai nama dan lambang partai, dan sebuah foto pemimpin partai, tetapi tidak ada namanama kandidat perorangan. Para pemilih hanya memilih partai yang mereka sukai; para kandidat perorangan yang dipilih sudah ditentukan terlebih dahulu oleh partai masing-masing. Ini berarti partai bisa menyertakan beberapa kandidat (mungkin anggota kelompok etnis dan bahasa minoritas, atau perempuan) yang boleh jadi akan sulit terpilih jika tidak dengan cara demikian (Andrew :2016:71)

Menurut Labolo (2015:65) sistem pemilu proporsional tertutup adalah pemilih hanya memilih partai politik, dan calon terpilih kemudian ditentukan berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan oleh partai politik. di Indonesia pernah mengalami sistem proposional tertutup ini.

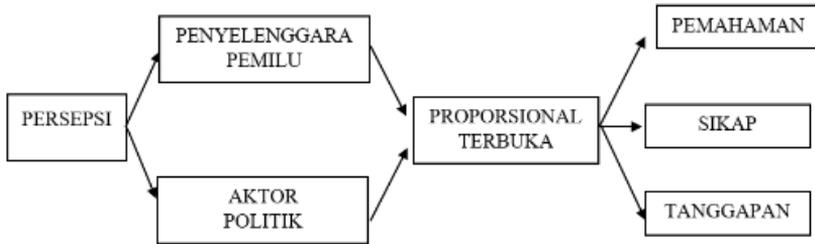
Negara-negara yang menggunakan sistem proposional tertutup ini adalah Argentina, Israel, Bulgaria, ekuador, El Salvador. Menurut Wall,( 2016) Aspek-aspek negatif daftar tertutup adalah para pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa wakil dari partai mereka. Daftar tertutup juga tidak responsif terhadap perubahan pesat yang terjadi. Dalam pemilu di Jerman Timur sebelum unifikasi pada tahun 1990, kandidat peringkat tertinggi salah satu partai diketahui adalah seorang informan polisi rahasia hanya empat hari sebelum pemilihan, dan dikeluarkan seketika

dari partai; tetapi karena daftarnya tertutup para pemilih tidak punya pilihan selain memilihnya sekiranya mereka ingin mendukung bekas partai sang informan yang ketahuan itu.

Menurut Kunicova, J. (2011:21) sistem proposional tertutup memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah mempersempit kanal partisipasi publik dalam Pemilu,serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca Pemilu.Proporsional tertutup, membuat komunikasi politik tidak berjalan secara efektif. Tidak hanya itu, krisis calon anggota legislatif juga menjadi sulit dihindari karena sedikitnya yang berminat dan serius maju menjadi Caleg. Hal itu disebabkan siapa-siapa saja yang duduk di parlemen nantinya sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari lantaran keputusannya ditentukan oleh partai. Pada sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh dan menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di kursi parlemen, setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi

Namun sistem proposional tertutup juga memiliki banyak keunggulan Sistem ini dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya Pemilu yang lebih murah jika dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. proporsional tertutup memastikan bahwa masyarakat cukup memilih partai dan biarlah partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen."Partai tahu betul siapa kader mereka yang punya kapasitas, integritas, serta narasi struktural dan kultural. Proporsional tertutup paling tidak mampu memompa wakil rakyat ke arah yang lebih baik (Kumolo, 2015)

## 2.3 Kerangka Berfikir



Sumber: diolah oleh penulis

## 2.4 Hipotesis

Dari pembahasan tentang tiga variabel persepsi di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Sistem proposional terbuka mengakibatkan pada tingginya berupa politik uang dan permasalahan kode etik
2. Sistem proposional terbuka mengakibatkan proses kaderisasi partai tidak berjalan dengan baik
3. Sistem Proposional terbuka berpengaruh pada hilangnya ideologi partai politik

## 2.5 Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah usaha untuk menerangkan atau menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, bila masalah dan teorinya sudah jelas

biasannya fakta yang menjadi gejala pokok perhatian telah diketahui pula (Burget, Mirjam, Bardone, 2017)

Definisi konsep digunakan dalam menjejaskan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan lainnya. Konsep pembahasan dalam penelitian ini menggunakan konsep pengaruh sebuah sistem adalah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah seseorang (individu) atau kelompok menganalisis suatu gambar atau kejadian disekitarnya. Persepsi akan muncul ketika seseorang/kelompok mengalami sebuah kejadian. Biasanya ini dipengaruhi sebuah sistem, lingkungan, maupun konflik
2. *Open List PR/Sistem Proposional* terbuka adalah suatu sistem yang sangat memungkinkan konstituen atau pemilih untuk turun dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan di pilih. Secara teknis dilapangan sistem ini memberikan suguhan nama-nama caleg kepada masyarakat dan masyarakat dapat memilih langsung caleg sesuai dengan kускаan pemilih. Tentu ini berbeda dengan sistem proposional tertutup yang hanya mengizinkan anggota partai yang aktif, pejabat partai, atau konsultan dalam menentukan urutan calon dan sama sekali tidak

memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memengaruhi posisi calon.

3. Partai Politik organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda
4. Elite Partai politik adalah sekelompok orang yang memiliki pengaruh di dalam internal partai dan membuat kebijakan untuk melakukan proses transformasi kepemimpinan di dalam pemerintahan. Kategori elite partai politik ini ialah orang-orang yang masuk dalam struktural partai politik tertinggi
5. Lembaga Penyelenggara pemilu organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan, dan bertanggung jawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya – seperti referendum dan pemungutan suara ulang – jika instrumen-instrumen tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja yang bersifat legal

## 2.6 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable, maka perlu adanya batasan-batasan penelitian dengan menentukan indikator-indikator. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel. 2.3. Operasional Konsep

Variabel	Indikator	Parameter
Persepsi	Pemahaman	Tingkat pengetahuan terkait sistem proposional terbuka
		Tingkat Pengetahuan pelaksanaan terkait sistem proposional terbuka
		Pemahaman dampak dari sistem proposional terbuka
	Sikap	Sikap penyelenggara pemilu dan aktor politik terhadap penerapan sistem proposional terbuka dalam pemilihan umum
Tanggapan	Tindakan yang dilakukan penyelenggara pemilu dan aktor politik dalam menyikap sistem proposional terbuka (Kritik secara formal, kritik melalui media sosial, mendukung)	